



**Effectiveness of Government Policies in the Development
of Sustainable Tourism Destinations**
(A Case Study of Danau Biru, Karang Sidemen Village, Batukliang Utara Subdistrict,
Central Lombok Regency)

Esa Dwi Andika¹, Mintasrihardi², Sulhan Hadi³

eandika306@gmail.com

FISIPOL, Universitas Muhammadiyah, Mataram, Indonesia

ABSTRACT

The development of sustainable tourism requires effective government policies, especially for village-based tourist destinations. This study aims to analyze the effectiveness of government policies in the development of the Danau Biru (Blue Lake) tourism destination in Karang Sidemen Village, Central Lombok Regency, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of these policies. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants include village government officials, managers of the Village-Owned Enterprises (BUMDes), representatives from the Tourism Office, and local community members around the tourism destination. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman interactive analysis model, while data validity is ensured through source and technique triangulation. The research findings indicate that the policy for developing Danau Biru tourism has not been fully effective. This is marked by a gap between planning and policy implementation, limited infrastructure and supporting facilities, weak coordination among stakeholders, and suboptimal promotion and community participation within the framework of sustainable tourism. This study highlights the importance of strengthening institutional capacity, improving human resource capacity, and fostering multi-party collaboration in improving the effectiveness of village-based tourism destination development policies.

Keywords: policy effectiveness, sustainable tourism, village tourism destination, Danau Biru

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah berperan penting dalam memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara terarah dan berkelanjutan melalui kebijakan publik yang efektif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, potensi pariwisata alam sangat besar, salah satunya Danau Biru di Desa Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun memiliki daya tarik alam yang kuat, pengembangan Danau Biru belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan yang terimplementasi secara optimal, terutama terkait infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, promosi, dan pengelolaan berbasis keberlanjutan.

Berbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah desa dan daerah, termasuk pengalokasian anggaran melalui RKPDDes dan pelibatan BUMDes sebagai pengelola destinasi wisata. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat yang belum terintegrasi sepenuhnya dalam konsep wisata berkelanjutan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan mampu mencapai tujuan pengembangan destinasi wisata secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan di Danau Biru Desa Karang Sidemen, dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata berkelanjutan di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki *research gap* yang jelas, mengingat sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada destinasi wisata berskala besar dan populer, sementara kajian mengenai efektivitas kebijakan pemerintah pada destinasi wisata skala kecil berbasis desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian kebijakan publik di sektor pariwisata, khususnya terkait pengembangan destinasi wisata berkelanjutan berbasis potensi dan kearifan lokal di wilayah perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **deskriptif kualitatif** yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan dan dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan.

Objek penelitian adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru yang berlokasi di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi aparatur pemerintah desa, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan aktivitas pariwisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi fisik destinasi dan aktivitas pengelolaan wisata, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perencanaan, implementasi, serta kendala kebijakan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip kebijakan, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang menjawab tujuan penelitian.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data yang diperoleh dibandingkan antar sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru di Desa Karang Sidemen belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan. Pemerintah desa telah menyusun perencanaan pengembangan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta mengalokasikan anggaran desa dan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan akses jalan, penyediaan fasilitas umum, serta penataan kawasan wisata. Selain itu, pengelolaan destinasi wisata telah dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga pengelola utama dengan melibatkan masyarakat lokal.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari aspek tugas dan fungsi kelembagaan, koordinasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal, sehingga beberapa program pengembangan belum terlaksana secara konsisten. Dari aspek rencana dan program, pembangunan fisik cenderung lebih dominan dibandingkan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola, promosi wisata, dan penerapan prinsip wisata berkelanjutan. Infrastruktur akses jalan menuju lokasi wisata masih menjadi kendala utama, khususnya dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

Dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung wisata seperti amenities, kebersihan kawasan, dan layanan wisata masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar destinasi wisata berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing Danau Biru dibandingkan destinasi lain yang lebih berkembang. Selain itu, promosi wisata masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara digital maupun melalui kerja sama lintas sektor, sehingga kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Biru telah berjalan, terutama melalui partisipasi dalam kegiatan usaha kecil dan jasa wisata. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya terarah pada konsep *community-based tourism* yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan meliputi besarnya potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan promosi, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, BUMDes, dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pengembangan wisata Danau Biru masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, perencanaan terpadu, dan kolaborasi multipihak agar mampu mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru di Desa Karang Sidemen masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementatif. Secara konseptual, kebijakan yang dirumuskan pemerintah desa telah selaras dengan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam perencanaan melalui RKPDDes dan pelibatan BUMDes sebagai pengelola destinasi wisata. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas pelaksanaan yang memadai, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.

Dari perspektif efektivitas kebijakan, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Pembangunan infrastruktur fisik memang telah dilakukan, tetapi belum diimbangi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan strategi promosi yang berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan program, melainkan juga oleh konsistensi implementasi serta koordinasi

antarpemangku kepentingan. Lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan BUMDes berimplikasi pada tidak sinkronnya program pengembangan wisata yang dijalankan.

Ditinjau dari komponen pengembangan destinasi wisata, keterbatasan pada aspek aksesibilitas dan amenities menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan daya saing Danau Biru. Infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai serta fasilitas pendukung wisata yang terbatas berdampak pada rendahnya kenyamanan wisatawan dan terbatasnya jangkauan pasar wisata. Selain itu, promosi wisata yang belum terintegrasi, khususnya melalui media digital dan kemitraan lintas sektor, menyebabkan potensi wisata Danau Biru belum dikenal secara luas, sehingga tingkat kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata telah memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat masih bersifat operasional dan belum didukung oleh peningkatan kapasitas yang berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan sinergi antaraktor kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan pengembangan wisata yang terpadu menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dan mewujudkan pengembangan destinasi wisata Danau Biru yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru di Desa Karang Sidemen belum sepenuhnya efektif dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan. Temuan utama mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran serta melibatkan BUMDes dalam pengelolaan destinasi wisata, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan promosi wisata yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata Danau Biru belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengembangan destinasi wisata Danau Biru masih berada pada kategori belum optimal. Kebijakan yang dirumuskan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pengembangan wisata berkelanjutan karena adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan, dominasi pembangunan fisik tanpa diimbangi pengembangan nonfisik, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam kerangka pariwisata berbasis komunitas.

Implikasi teoretis dari penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan publik, khususnya di sektor pariwisata, sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan mekanisme koordinasi antaraktor. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan wisata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta mengembangkan strategi promosi dan kemitraan lintas sektor guna meningkatkan daya saing destinasi wisata berbasis desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain fokus penelitian yang hanya dilakukan pada satu destinasi wisata dan pendekatan kualitatif yang belum mengukur efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa destinasi wisata sejenis, menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), serta mengkaji lebih lanjut dampak kebijakan

pengembangan wisata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan (Studi kasus pada danau biru desa karang sidemen kecamatan batukliang utara kabupaten lombok tengah), maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata Danau Biru belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya infrastruktur pendukung, serta promosi wisata yang belum terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan pemerintah belum tercapai secara optimal, sehingga diperlukan langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian, disarankan agar pemerintah desa bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, khususnya antara pemerintah desa, BUMDes, Dinas Pariwisata, dan masyarakat lokal. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan wisata, serta penerapan prinsip pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, strategi promosi wisata perlu dikembangkan secara lebih sistematis melalui pemanfaatan media digital dan kemitraan lintas sektor guna meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata Danau Biru.
3. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan kolaborasi multipihak. Pemerintah di tingkat lokal disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata berbasis desa. Secara teoretis, penelitian ini memberikan penguatan terhadap kajian kebijakan publik dan pariwisata dengan menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara tujuan, pelaksana kebijakan, dan konteks sosial masyarakat setempat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada satu destinasi wisata serta pendekatan kualitatif yang belum mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa destinasi wisata berbasis desa, menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), serta mengkaji secara lebih mendalam dampak kebijakan pengembangan wisata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, A., & Prasetyo, A. (2016). Pengambilan Sampel dalam penelitian survey.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A*

methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Sutrisno, H. (1984). *Statistik jilid II*. Yayasan Penerbit Falkutas Psikologi UGM Yogyakarta.

UNWTO. (2018). *Sustainable tourism for development guidebook*. Madrid: World Tourism Organization.

Winarno, B. (2017). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yoeti, O. A. (2016). *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.